

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Ruang

Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dimana pun dia berada, baik secara psikologi dan emosional (persepsi), maupun dimensional. Manusia selalu berada dalam ruang, bergerak serta menghayati, berpikir dan juga menciptakan ruang untuk menyatakan bentuk dunianya. Ciptaan yang artistik disebut ruang arsitektur. Ruang arsitektur ini menyangkut interaksi antara ruang dalam dan ruang luar, yang saling mendukung dan memerlukan penataan lebih lanjut.

Ruang mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia semua kehidupan dan kegiatan manusia berkaitan dengan aspek ruang. Adanya hubungan antara manusia dengan suatu obyek, baik secara visual maupun melalui indra pendengar, indra perasa, dan indra penciuman akan selalu menimbulkan kesan ruang.

Ruang sebagai salah satu komponen arsitektur menjadi penting dalam pembahasan studi hubungan arsitektur lingkungan dan perilaku karena fungsinya sebagai wadah kegiatan manusia. Perilaku dioperasionalkan sebagai kegiatan manusia yang membutuhkan setting atau wadah kegiatan yang berupa ruang. Berbagai kegiatan manusia saling berkaitan dalam satu sistem kegiatan. Dengan demikian wadah-wadah berbagai kegiatan tersebut juga terkait dalam suatu sistem pula.

Keterkaitan wadah-wadah kegiatan inilah yang membentuk tata ruang yang merupakan bagian dari bentuk arsitektur.

Definisi ruang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah rongga atau tempat yang terbatas atau terlingkung oleh bidang. Sedangkan menurut Plato dalam Hakim (1991) Ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana obyek dan kejadian tertentu berada. Menurut Imanuel Kant berpendapat dalam Edward (1972), bahwa ruang bukanlah sesuatu yang obyektif sebagai hasil pikiran dan pikiran perasaan manusia.

Konsep mengenai ruang (space), selama ini dikembangkan melalui beberapa pendekatan yang berbeda dan selalu mengalami perkembangan. Menurut Friedman dan Weaver Harvey dalam Haryadi, Setiawan B (1995), terdapat 3 pendekatan mengenai ruang, yaitu:

- *Ecological Approach* (pendekatan ekologis)
Ruang sebagai satu kesatuan ekosistem, dimana komponen-komponen ruang saling terkait dan berpengaruh secara mekanistik.
- *Functional/economical approach* (pendekatan ekonomi dan fungsional)
Ruang sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting.
- *Socio-political approach* (pendekatan sosial-politik)
Ruang tidak sebagai sarana produksi akan tetapi juga sebagai sarana untuk mengakumulasi power atau penguasaan ruang.

Ketiga pendekatan diatas akan terasa lebih lengkap apabila diikutsertakan unsur manusia sebagai *human agency* yang mempunyai kehendak dan kemauan (Flanagan, 1992)

Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan manusia selalu bergerak dan berada didalamnya. Ruang tidak akan ada artinya jika tidak ada manusia. Oleh karena itu, titik tolak dari perancangan ruang harus selalu didasarkan pada manusia.

Menurut Szokolay (1980) hubungan manusia dengan ruang lingkungan dapat dibagi 2, yaitu:

- Hubungan Dimensional (*Antropometrics*)

Menyangkut dimensi-dimensi yang berhubungan dengan tubuh manusia dan pergerakannya untuk kegiatan manusia.

- Hubungan Psikologi dan Emosional (*Proxemics*)

Hubungan ini menentukan ukuran-ukuran kebutuhan ruang untuk kegiatan manusia.

Hubungan keduanya menyangkut persepsi manusia terhadap ruang lingkungannya.

Dalam hubungan dengan ruang, Edward T.Hall dalam Hakim (1991), menulis bahwa: "Salah satu perasaan kita yang penting mengenai ruang ialah perasaan teritorial. Perasaan ini memenuhi kebutuhan dasar akan identitas diri, kenyamanan dan rasa aman pada pribadi manusia.

2.1.1 Fungsi Ruang

Pengertian fungsi adalah pemikiran-pemikiran yang sangat sederhana untuk membuat sesuatu (Hendraningsih, dkk, 1982). Batasan fungsi dalam arsitektur adalah pemenuhan terhadap aktivitas manusia, tercakup di dalamnya kondisi alami. Bangunan yang fungsional adalah bangunan yang dalam penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan secara tepat dan tidak mempunyai unsur-unsur yang tidak berguna. Keberadaan fungsi sebagai akibat adanya kebutuhan manusia dalam usahanya untuk mempertahankan mengembangkan hidupnya di alam semesta ini. Kompleksitas atau keragaman fungsi dapat diukur dari tingkat kebudayaan suatu masyarakat.

2.1.2 Aktivitas

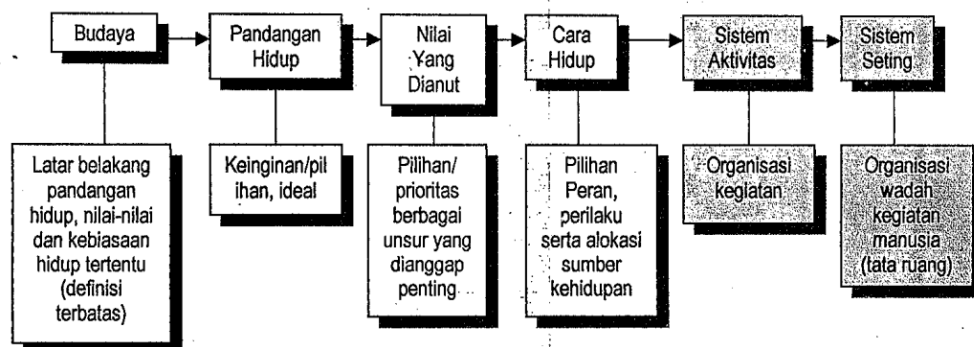
Aktivitas yang akan diuraikan pada sub bab ini dikaitkan dengan perilaku, di mana pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, nilai-nilai serta norma-norma yang dipegang seseorang akan mencerminkan perilaku orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rapoport (1977) bahwa konteks kultural dan sosial akan menentukan sistem aktivitas atau kegiatan manusia. Sistem kegiatan dan cara hidup akan menentukan macam dan wadah untuk kegiatan tersebut di mana wadah tersebut ruang-ruang yang saling berhubungan dalam satu sistem tata ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan.

Oleh Bechtel dan Zeisel dalam Haryadi dan Setiawan (1995), kegiatan atau aktivitas didefinisikan sebagai apa yang dikerjakan oleh seseorang pada jarak waktu tertentu. Aktivitas atau kegiatan tersebut terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pelaku.
- b. Macam kegiatan.
- c. Tempat.
- d. Waktu berlangsungnya kegiatan

2.2 Perilaku Sebagai Suatu Pendekatan

Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat (yang berbeda-beda di setiap daerah) dalam memanfaatkan ruang. Pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep dan wujud ruang yang berbeda (Rapoport, 1969).



Gambar 2.1. Hubungan Antara Budaya, Perilaku, Sistem Aktivitas dan Sistem Seting
Sumber Rapoport, Amos 1977

Fenomena perilaku yang terjadi merupakan hasil dari bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik. Dari bentuk interaksi akan menghasilkan apa yang disebut atribut. Atribut adalah kualitas lingkungan yang dirasakan sebagai pengalaman manusia, merupakan produk organisasi, individu dan setting fisik. Atribut(fenomena) ini terdiri dari kenyamanan (*comfort*), sosialitas (*sociality*), legibilitas (*legibility*), aksesibilitas (*accessibility*), adaptibilitas (*adaptability*), rangsangan inderawi (*sensory stimulation*), aktivitas (*activity*), kontrol (*control*), makna (*meaning*), kesesakan (*crowdedness*), privasi (*privacy*), visibilitas (*visibility*)

2.3 Teritori

Teritori adalah ruang yang dikuasai dan dikendalikan oleh individu atau kelompok, tempat seseorang atau kelompok ingin menjadi diri sendiri atau menyatakan diri, memiliki dan melakukan pertahanan. Pemahaman penguasaan atas ruang, dapat berarti merupakan suatu kepemilikan (misalnya rumah tinggal), kontrol atas ruang yang sifatnya privat (misalnya:ruangan rektor dan manajer) atau bersifat publik (misalnya tempat orang berkumpul dan bersosialisasi di dalam taman). Menurut Robert Sommer (Halim,2005), teritori merupakan sesuatu yang terlihat, relatif menetap, berpusat pada tempat dan mengatur orang yang ingin berinteraksi.

Menurut Halim (2005), teritori mempunyai lima ciri, yaitu:

1. Mempunyai ruang, yaitu teritori merupakan suatu ruang (space) yang bersifat fisik dan dapat dilihat.
2. Dikuasai, dimiliki atau dikendalikan oleh individu (ruang-ruang yang bersifat privat) atau kelompok (ruang publik).
3. Memuaskan beberapa kebutuhan dan motif, misalnya untuk memperlihatkan status seseorang.
4. Ditandai baik secara konkrit atau simbolik
5. Dipertahankan atau setidaknya orang merasa tidak senang bila wilayahnya dimasuki atau dilanggar dengan cara apapun oleh orang lain atau orang yang dirasa asing.

2.3.1 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Teritori

Ada keanekaragaman karakter yang menentukan terbentuknya teritori. Laurens (2004) menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi keanekaragaman teritori, yaitu:

1. Faktor personal

Karakteristik seseorang (seperti jenis kelamin, usia dan kepribadian) diyakini mempunyai pengaruh terhadap sikap teritorialitas. Di tempat kerja atau stadion sepak bola, pria menggambarkan teritori yang diklaim sebagai miliknya lebih besar daripada wanita. Sebaliknya dapur merupakan teritori bagi ibu atau wanita. Contoh yang lain misalnya, teritori kamar tidur orang

dewasa, lebih ketat daripada kamar tidur anak-anak. Ruang tidur untuk orang dewasa sifatnya lebih privat, tidak semua orang bisa memasukinya. Sebaliknya untuk anak-anak bersifat lebih terbuka, teman-temannya dapat masuk dan bermain didalamnya. Biasanya orang yang berkepribadian tertutup (*introvert*) mempunyai teritori yang lebih besar daripada orang dengan kepribadian terbuka (*extrovert*).

2. Faktor Situasi

Tatanan fisik dan sosial budaya dianggap mempunyai peran dalam menentukan teritorialitas seseorang. Desain tata letak, desain bangunan dan desain jalan dapat mempengaruhi teritorialitas penghuninya. Beberapa contoh misalnya:

- Rumah dengan tanah yang luas mempunyai teritori yang besar untuk daerahnya, tetapi dari segi lingkungan mempunyai teritori yang kecil
- Rumah dengan bentuk pagar yang tinggi dan solid akan mempunyai teritori yang besar dibandingkan dengan rumah dengan pagar rendah atau transparan
- Jalan dengan bentuk culdesac mempunyai teritori yang besar karena akan dapat memfasilitasi keakraban diantara warga untuk saling mengenal, saling mengawasi keamanan lingkungannya dibandingkan dengan jalan yang lurus.

3. Faktor Budaya

Hubungan persaudaraan dan kebiasaan di daerah setempat sangat berpengaruh terhadap teritori. Di daerah pedesaan dengan keadaan batas antara rumah satu dengan lainnya yang bersifat transparan (bahkan sering tidak jelas) akan menimbulkan teritori yang kecil bagi penghuninya, tetapi menjadi besar untuk lingkungannya. Demikian juga dengan kebiasaan hubungan antar tetangga di pedesaan yang lebih akrab dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di pedesaan orang dapat keluar masuk ke rumah tetangganya dengan bebas, sebaliknya di kota tidak. Perbedaan ini akan mempengaruhi teritori.

2.4 Definisi Rumah Tinggal

Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (*structural*), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya; lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan pada segala peristiwa

hidupnya (Pusat Informasi Teknik Bangunan D.I.Yogyakarta dalam Kurniasih, 2007).

Terjadinya tuntutan terhadap tempat tinggal juga dipengaruhi oleh adanya beberapa fungsi rumah yang menjadi keharusan oleh penghuninya. Menurut Budiharjo (1994), fungsi rumah adalah sebagai berikut :

- a. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri. Rumah diharapkan menjadi simbol dan pencerminan tata nilai dan selera pribadi penghuninya.
- b. Rumah dianggap sebagai wadah keakraban, rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman
- c. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi. Rumah disini merupakan tempat kita melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan kegiatan rutin.
- d. Rumah merupakan wadah kegiatan sehari-hari dan sebagai pusat jaringan sosial serta rumah sebagai struktur fisik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan suatu rumah:

1. Faktor kultur

Pada umumnya setiap daerah mempunyai konsep yang berbeda-beda mengenai bentuk rumahnya yang dipengaruhi oleh konsep kultural yang berbeda mengenai bentuk dan pola rumah.

2. Faktor religi

Dalam masyarakat tradisional rumah merupakan wujud mikro dari makro kosmos yaitu alam semesta. Setiap unsur yang membentuk rumah melambangkan unsur tertentu dari alam.

3. Faktor perilaku

Perilaku dan lingkungan fisik saling mempengaruhi dan akhirnya mewujudkan suatu pola kehidupan yang spesifik. Rapoport (1969) berpendapat bahwa rumah merupakan suatu gejala struktural yang bentuk dan organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimilikinya, serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuninya. Makna simbolisme dan fungsi akan mencerminkan status penghuninya, manusia sebagai penghuni, rumah, budaya serta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang erat, sehingga rumah sebagai lingkungan binaan merupakan refleksi dari kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan keluarga, organisasi sosial serta interaksi sosial antar individu. Antara penghuni dan rumahnya mempunyai suatu hubungan yang saling bergantung satu sama lain, yaitu manusia mempengaruhi rumah dan sebaliknya rumah mempengaruhi penghuninya. Lebih lanjut Rapoport (1969) menambahkan bahwa rumah banyak ditentukan oleh nilai-nilai, budaya penghuninya, iklim dan kebutuhan akan pelindung, bahan bangunan, konstruksi dan teknologi, karakter tapak, ekonomi, pertahanan serta agama.

Perubahan budaya berpengaruh terhadap rumah dan lingkungannya, di mana bentuk perubahan tidak berlangsung spontan dan menyeluruh, tetapi tergantung pada kedudukan elemen rumah dan lingkungannya dalam sistem budaya, sehingga ada elemen yang tidak berubah dan ada elemen yang berubah sesuai perkembangan zaman (Rapoport, 1983).

2.5 Definisi Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, alam panoramanya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan asing khususnya. Wujud desa wisata adalah suatu bentuk desa sebagai obyek sekaligus juga sebagai subyek bagi kepariwisataan. Sebagai suatu obyek maksudnya adalah bahwa desa wisata merupakan tujuan bagi kepariwisataan, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa wisata sebagai penyelenggara sendiri, apa yang dihasilkan oleh desa tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung. Peran aktif dari masyarakat sangat menentukan dalam kelangsungan desa wisata tersebut.”

Menurut Wiendu Nuryanti, Phd dalam makalahnya “Pariwisata dalam Masyarakat Tradisional”, 1992

“Desa wisata dalam hal ini adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur

kehidupan masyarakat menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”.

Selain itu menurut Wiendu Nuryanti ada dua konsep yang penting dalam komponen desa wisata yaitu:

1. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang sifatnya spesifik.

2.5.1 Kriteria Pengembangan Desa Wisata

Suatu desa dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata apabila memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut (Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Desa wisata Pundong, Fakultas Teknik UGM, 2000):

1. Memiliki Potensi Produk/ Daya Tarik

Memiliki potensi produk/daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, budaya). Potensi obyek dan bagi daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan sautu

kawasan pedesaan menjadi Desa Wisata. Potensi-potensi tersebut dapat berupa:

- Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas dan sebagainya)
- Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional dan sebagainya)

2. Memiliki dukungan sumber daya manusia

Memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di desa tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat dan bukan pihak lain.

3. Motivasi kuat dari masyarakat

Adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam pedesaan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat

setempat. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat mendasar, karena komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin kelangsungan daya tarik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki desa tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut akan hilang, dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali.

4. Mempunyai dukungan sarana dan prasarana

Beberapa sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk menunjang kegiatan yang di desa wisata diantaranya adalah jalan, air bersih, telepon, listrik, pembuangan limbah, terminal pembantu dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan pola pengembangan desa wisata.

5. Mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata

Fasilitas umum ini pada dasarnya bukan semata-mata untuk kegiatan wisata saja, tetapi sangat membantu di dalam memperlancar keseluruhan kegiatan. Fasilitas yang diperlukan diantaranya adalah kantor pos dan telekomunikasi, warung-warung makan, kios cinderamata, homestay dan lain-lain.

6. Mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata

Dalam suatu obyek wisata, keberadaan lembaga sangat diperlukan sebagai media untuk dapat menampung, menagatur serta

mengelola atau mengontrol keseluruhan kegiatan maupun berbagai kepentingan yang ada. Lembaga ini dapat dibentuk oleh masyarakat dengan didukung oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Dengan demikian, segala kegiatan kepariwisataan yang ada dapat dikontrol dan dapat diatur sehingga semua kebutuhan serta berbagai masukan pengembangan dapat ditampung dan ditindaklanjuti secara bersama-sama.

7. Ketersediaan latihan/ area yang dimungkinkan untuk pengembangan

Memiliki alokasi lahan atau area yang dimungkinkan untuk dikembangkan fasilitas pendukung wisata pedesaan, seperti: akomodasi homestay, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktivitas wisata pedesaan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung sebagai ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya.

2.5.2 Prinsip Dasar Desa Wisata

Menurut Edward Inskeep (1991) sebagai bentuk struktur dari pariwisata, desa wisata dihubungkan dengan tinggal di dalam atau di

dekat desa tradisional di tempat-tempat terpencil, belajar mengenai desa dan budaya lokal cara hidup penduduk, dan sering berpartisipasi di dalam aktivitas desa. Penduduk desa membangun, memiliki, dan mengelola pelayanan dan fasilitas wisatawan dan dengan demikian keuntungan diterima langsung oleh penduduk desa.

Pengembangan desa wisata, terutama di daerah terpencil, area-area tradisional membutuhkan analisis yang mungkin terjadi secara nyata. Sebagai model dasar di lokasi desa, harus berhati-hati di dalam pemilihan site dan merencanakan fasilitas-fasilitas di dalam koordinasi dengan penduduk desa, kerjasama diantara penduduk desa sendiri di dalam pengembangan dan pengelolaan dan pemasaran yang selektif. Desa-desanya tersebut harus menentukan sendiri apa yang mereka inginkan didalam pengembangan dan pengelolaan dan pemasaran yang selektif. Desa-desanya tersebut harus menentukan sendiri apa yang mereka inginkan di dalam mengembangkan kegiatan wisata, dan penduduk desa seharusnya diikutsertakan didalam proses perancangan, pengembangan dan manajemen dan tidak hanya diikutsertakan dalam mengambil keputusan. Desa wisata ini tipe pariwisata yang dapat memberikan kerangka kerja yang saling menguntungkan antara wisatawan dan penduduk setempat, memberi keuntungan secara nyata bagi masyarakat desa dan penyebaran keuntungan ekonomi dan kegiatan pariwisata lebih luas di area desa, tetapi dampak sosioekonomi dan lingkungan harus secara terus menerus dimonitor.

2.6 Tata Guna Lahan

2.6.1 Definisi Guna Lahan

Definisi lahan sendiri dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi fisik geografi, lahan merupakan wadah bagi sebuah hunian yang mempunyai kualitas fisik yang penting dalam penggunaannya. Sedangkan ditinjau dari segi ekonomi lahan adalah sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam suatu produksi (Lichfield dan Drabkin, 1980). Sedangkan definisi tata guna tanah/lahan adalah pengaturan dan penggunaan yang meliputi penggunaan di permukaan bumi di daratan dan permukaan bumi di lautan. Adapun definisi tata guna tanah perkotaan adalah pembagian dalam ruang dari peran kota; kawasan tempat tinggal, kawasan tempat bekerja dan rekreasi. (Jayadinata, 1999). Jayadinata mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada satu waktu.

Guna lahan (*land use*) menurut Edy Darmawan (2009) adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pemanfaatan lahan di kota selalu dihubungkan dengan penilaian yang bertumpu pada ekonomis atau tidaknya jika sebidang tanah dimanfaatkan baik untuk rumah tinggal maupun melakukan usaha di atas tanah tersebut.

Ada 3 (tiga) sistem yang berhubungan dengan penggunaan lahan kota menurut Chapin dan Kaiser (1979), yaitu:

1. Sistem Aktivitas Kota, berhubungan dengan manusia dan lembaganya seperti rumah tangga, perusahaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam mengorganisasikan hubungan-hubungan mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam waktu dan ruang. Dalam melakukan interaksi ini, melibatkan dimensi hubungan yang kadang-kadang menggunakan media tetapi tidak jarang juga berhadapan langsung dengan di dukung oleh sistem transportasi.
2. Sistem Pengembangan Lahan, berhubungan dengan proses konversi atau rekonversi lahan (ruang) dan penyesuaiannya bagi kegunaan manusia dalam mendukung sistem aktivitas yang telah ada sebelumnya. Sistem pengembangan lahan ini berhubungan dengan lahan kota baik dari segi penyediaan maupun dari segi ekonominya. Dalam sistem pengembangan lahan ini, unsur-unsur yang terlibat adalah pemilik lahan, developer, konsumen, agen keuangan dan agen-agen masyarakat.
3. Sistem Lingkungan, berhubungan dengan unsur-unsur biotik dan abiotik yang dihasilkan dari proses alam yang dikaitkan dengan air, udara dan zat-zat lain. Sistem ini berfungsi untuk

menyediakan tempat bagi kehidupan dan keberadaan manusia dan habitat serta sumber daya untuk mendukung kelangsungan hidup manusia.

2.6.2 Pengaruh Guna Lahan Terhadap Pergerakan

Sistem transportasi perkotaan terdiri dari berbagai aktivitas yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tata guna lahan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perjalanan diantara dua tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi. Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan dan barang yang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Hampir semua interaksi memerlukan perjalanan dan oleh sebab itu menghasilkan pergerakan arus lalu lintas (Tamin dalam Yusran 2006).

Karakteristik dan intensitas penggunaan lahan akan mempengaruhi karakteristik pergerakan penduduk. Pembentuk pergerakan ini dibedakan atas pembangkit pergerakan dan penarik pergerakan. Perubahan guna lahan akan berpengaruh pada peningkatan bangkitan perjalanan yang akhirnya akan menimbulkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi. Sedangkan besarnya tarikan pergerakan ditentukan oleh tujuan atau maksud perjalanan dapat disimpulkan bahwa berbagai aktivitas akan memberi dampak pergerakan yang berbeda pada saat ini dan masa datang.

2.6.3 Perubahan Guna Lahan

Pengertian konversi lahan atau perubahan guna lahan adalah alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lain (Tjahjati dalam Yusran, 2006). Namun sebagai terminologi dalam kajian-kajian *Land economics*, pengertiannya terutama difokuskan pada proses dialihgunakannya lahan dari lahan pertanian atau perdesaan ke penggunaan non-pertanian atau perkotaan yang diiringi dengan meningkatnya nilai lahan (Pierce dalam Iwan Kustiwan 1997).

Mengutip penjelasan Bourne (1982), bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan lahan, yaitu: perluasan batas kota; peremajaan di pusat kota; perluasan jaringan infrastruktur terutama jaringan transportasi; serta tumbuh dan hilangnya pemusatan aktifitas tertentu. Secara keseluruhan perkembangan dan perubahan pola tata guna lahan pada kawasan permukiman dan perkotaan berjalan dan berkembang secara dinamis dan natural terhadap alam, dan dipengaruhi oleh:

1. Faktor manusia, yang terdiri dari: kebutuhan manusia akan tempat tinggal, potensi manusia, finansial, sosial budaya serta teknologi.
2. Faktor fisik kota, meliputi pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan kota dan jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian.

3. Faktor bentang alam yang berupa kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Anthony J. Catanese (1986) mengatakan bahwa dalam perencanaan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh manusia, aktifitas dan lokasi, dimana hubungan ketiganya sangat berkaitan, sehingga dapat dianggap sebagai siklus perubahan penggunaan lahan.

2.7 Morfologi

2.7.1 Pengertian Morfologi

Karya arsitektur merupakan salah satu refleksi dan perwujudan kehidupan dasar masyarakat, memuat sejumlah makna yang dapat dikomunikasikan (Rapoport, 1969). Keseragaman dan keberagaman sebagai ungkapan perwujudan fisik yang terbentuk yaitu citra dalam arti identitas akan memberikan makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*). Untuk memahami makna tersebut ada tiga komponen struktural yang dapat dikaji menurut Schulz (1988), yaitu :

- a. Topologi menyangkut tatanan sosial (*spacial order*) dan pengorganisasian ruang (*spacial organization*) yang dalam hal ini menyangkut ruang (*space*) berkaitan dengan tempat (*place*) yang abstrak.
- b. Morfologi menyangkut kualitas spasial figural dan konteks wujud pembentuk ruang yang dapat dibaca melalui pola, hirarki, dan hubungan ruang satu dengan yang lainnya.

- c. Tipologi lebih menekankan pada konsep dan konsistensi yang dapat memudahkan masyarakat mengenal bagian-bagian arsitektur.

Kata morfologi terdiri dari dua suku kata yaitu *morf* yang berarti bentuk dan *logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana morfologi kota berarti ilmu yang mempelajari produk bentuk-bentuk fisik kota secara logis. Morfologi merupakan pendekatan dalam memahami bentuk logis sebuah kota sebagai produk perubahan *sosio-spatial*. Hal ini disebabkan karena setiap karakteristik *sosio-spatial* di setiap tempat berbeda-beda. Dari pengertian di atas morfologi merupakan salah satu komponen struktural dalam pemahaman makna sebagai pembentuk citra suatu tempat (*place*). Morfologi membahas mengenai bentuk fisik suatu tempat yang dapat dibaca melalui pola, hirarki, dan hubungan ruang satu dengan yang lainnya.

2.7.2 Morfologi Ruang

Morfologi lebih menekankan pada pembahasan bentuk geometrik, sehingga untuk memberi makna pada ungkapan ruangnya harus dikaitkan dengan nilai ruang tertentu. Nilai ruang saling berkaitan dengan organisasi ruang, hubungan ruang, dan bentuk ruang. Nilai ruang yang disebabkan hirarki ruang karena adanya perbedaan bentuk maupun ruangnya yang menunjukkan adanya derajat kepentingan baik secara fungsional, formal, maupun simbolik. Sistem tata nilai ruang bisa tercipta dengan adanya

besaran atau ukuran yang berbeda, bentuk yang unik dan lokasi. (Ching, 1979)

Morfologi bentuk tidak lepas dari transformasi. Darer (dalam Steadman,1983) mencontohkan dengan bentuk persegi panjang mentransformasi bidang-bidang yang terdapat di dalamnya hingga membentuk suatu pola baru namun masih dalam jenis yang saling berkaitan.

Perubahan ruang dapat dilihat dari elemen-elemen yang ada didalamnya. Elemen ruang menurut Rapoport (1982) dibagi menjadi:

- Elemen Fix, yaitu elemen ruang yang telah stabil dan sangat sedikit mengalami pergeseran/perubahan bentuk. Kebanyakan elemen arsitektural merupakan elemen fix, seperti dinding, plafon, lantai, dan lain-lain. Jalan dan bangunan juga menjadi elemen fix di dalam sebuah kota.
- Elemen Semifix, yaitu elemen ruang yang lebih mudah berubah dan dipindahkan, seperti perabot di dalam bangunan dan perabot jalan di dalam perkotaan.
- Elemen Non Fix, yaitu elemen ruang yang berhubungan dengan penduduk di dalam sebuah setting ruang. Ruang ini terbentuk dari bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kebiasaan non verbal yang terjadi di dalamnya yang dapat menciptakan komunikasi dan makna.

Dalam kaitannya dengan elemen pembentuk ruang dalam suatu site, ada tiga dasar yang dapat dikatakan sebagai indikasi suatu perubahan pada fisik lingkungan, Habraken (1982). Ketiga hal tersebut meliputi :

a. Penambahan (*addition*)

Penambahan (*addition*) adalah penambahan suatu elemen dalam suatu site sehingga terjadi perubahan. Misalnya menambah sekat partisi pada suatu ruang sehingga ruang yang tercipta bertambah. Menambah elemen fasad (pintu, jendela atau elemen fasad lainnya) pada bidang pelingkup tertentu dan sebagainya.

b. Pengurangan/membuang (*elimination*)

Pengurangan (*elimination*) adalah pengurangan suatu elemen dalam suatu site sehingga terjadi perubahan. Misalnya, membongkar salah satu bidang dinding ruangan dengan maksud memperluas ruang atau menyatukan dua ruangan menjadi satu, menghilangkan jendela pada fasad dan mengganti model jendela tersebut juga termasuk perubahan akibat pengurangan elemen pada suatu bagian ruang

c. Pergerakan/perpindahan (*Movement*).

Pergerakan (*Movement*) adalah perubahan yang disebabkan oleh perpindahan atau pergeseran elemen pembentuk ruang pada suatu site. Misalnya memindahkan atau menggeser posisi bidang dinding pada suatu ruang ke tempat lain atau ke sisi lain, memindahkan posisi tangga, memindahkan posisi pintu dari satu sisi ke sisi lain pada fasad atau bidang

ruang lainnya juga termasuk pergerakan menyebabkan suatu fisik bangunan dikatakan berubah.

Faktor yang melandasi atau mempengaruhi terjadinya perubahan rumah sifatnya sangat relatif bagi penghuni. Rapoport (1969) mengemukakan bahwa perubahan berkaitan dengan adanya perkembangan pengetahuan dan kemampuan manusia dalam mengendalikan alam. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor : Kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama.

Perubahan rumah adalah bagian dari suatu kegiatan manusia untuk memperbaiki mutu hidupnya. Kegiatan ini terutama didorong oleh motivasi yang ditimbulkan akibat adanya kebutuhan. Melalui model "hierarchy of Needs" Maslow (1993) memperlihatkan adanya kebutuhan manusia yang bertingkat tingkat. Sebagai sebuah rumah jelas merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Kemampuan manusia untuk mengadaptasikan dirinya pada suatu kondisi lingkungan fisik dan kemampuan membentuk rasa rumah yang mengakibatkan konsep perubahan fisik sebuah rumah bervariasi banyak sekali.

Kebutuhan hidup seseorang berkaitan dengan lingkungan atau perubahan yang terjadi pada lingkungannya, berkaitan pula dengan pengaruh luar yang diterima, perubahan kebutuhan akan menyebabkan perubahan pada

ruang-ruang rumah (Lang, 1987). Salah satu aspek yang berperan dominan pada perubahan bentuk rumah adalah aspek ekonomi.

Dengan adanya transformasi dalam penggunaan ruang, hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian perilaku manusia terhadap perubahan tersebut. Menurut Turner, 1972 terdapat dua jenis penyesuaian perilaku manusia tersebut, yaitu :

- a. *Housing adaptation*, yaitu usaha penghuni dalam menyesuaikan perilakunya, sebagai tanggapan atas kebutuhan ruang untuk melakukan aktifitas pada rumahnya. Hal ini disebut “bersifat pasif”.
- b. *Housing adjustment*, yaitu usaha memenuhi kebutuhan, ketika penghuni merasakan kekurangan ruang untuk beraktifitas pada rumahnya. Bentuk tindakannya dapat berupa pindah rumah, pengubahan atau melakukan penambahan ruang terhadap rumahnya, agar tingkat privasi lebih dapat tercapai.

2.8 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut PBB dalam Slamet (1994) adalah sebagai bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, dan

(c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Dari sini nampak bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi baik pada tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan serta manfaat yang akan diperolehnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994).

Sedangkan menurut Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain keadaan tertentu dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian.

a. Tipe Partisipasi

Dalam partisipasi masyarakat ada beberapa tipe-tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasikan)

- 2) Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi)
- 3) Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial, dan personel) Dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Cohen dan Uphoff, dalam Komaruddin)

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan kaitannya dengan partisipasi, menurut Dusseldorp (1981) terdapat dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu:

1) Partisipasi Bebas

Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara suka rela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa di pengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakini melalui penyuluhan atau oleh pengaruh orang lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam kelompok aktivitas tertentu.

2) Partisipasi Terpaksa

Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini tertuang di dalam peraturan/instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi terpaksa karena ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat itu sendiri.

Bintarto (1983) mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Serta keterlibatan

dalam memikul beban dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan juga keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat sebagai partisipasi vertikal dan horisontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berbeda dalam posisi bawahan pengikut atau klien. Partisipasi horisontal terjadi karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa dimana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu sama lain dalam usaha bersama, maupun dalam rangka kegiatan dengan pihak lain. Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dampak partisipasi masyarakat yang ditumbuhkan dari atas, masyarakat cenderung lebih bersifat pasif, dan jika partisipasi itu bersifat horisontal, maka akan menumbuhkan sifat aktif dan mandiri.

b. Keuntungan/Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers dalam Slamet (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang penting.

- Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan

sikap masyarakat setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal

- Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep “man centred development” yaitu suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri.

2.8 Kesimpulan Teori

1. Ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana obyek dan kejadian tertentu berada. Ruang identik dengan suatu lingkungan bagi kegiatan dengan tanda-tanda dan simbol yang akan mengkomunikasikan kepada orang-orang dimana mereka berada secara fisik dan psikologis.
2. Ada 3 pendekatan mengenai ruang, yaitu *Ecological Approach* (pendekatan ekologis), *Functional/economical approach* (pendekatan ekonomi dan fungsional), dan *Socio-political approach*

(pendekatan sosial-politik). Ketiga pendekatan ini akan terasa lebih lengkap apabila diikutsertakan unsur manusia sebagai *human agency* yang mempunyai kehendak dan kemauan. Ruang tidak akan ada artinya jika tidak ada manusia. Oleh karena itu, titik tolak dari perancangan ruang harus selalu didasarkan pada manusia.

3. Pendekatan perilaku menekankan perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat (yang berbeda-beda di setiap daerah) dalam memanfaatkan ruang. Pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsep dan wujud ruang yang berbeda. Fenomena perilaku yang terjadi merupakan hasil dari bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik. Dari bentuk interaksi akan menghasilkan apa yang disebut atribut.
4. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya; lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya.
5. Teritori adalah ruang yang dikuasai dan dikendalikan oleh individu atau kelompok, tempat seseorang atau kelompok ingin menjadi diri sendiri atau menyatakan diri, memiliki dan melakukan pertahanan.

Pemahaman penguasaan atas ruang, dapat berarti merupakan suatu kepemilikan (misalnya rumah tinggal), kontrol atas ruang yang sifatnya privat (misalnya:ruangan rektor dan manajer) atau bersifat publik (misalnya tempat orang berkumpul dan bersosialisasi di dalam taman).

6. Desa wisata dalam hal ini adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7. Kriteria pengembangan wisata antara lain memiliki potensi produk/ daya tarik, memiliki dukungan sumber daya manusia, motivasi kuat dari masyarakat, mempunyai dukungan sarana dan prasarana, mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, ketersediaan latihan/ area yang dimungkinkan untuk pengembangan.
8. Elemen ruang dapat dibagi dibagi menjadi:
 - Elemen Fix, yaitu elemen ruang yang telah stabil dan sangat sedikit mengalami pergeseran/perubahan bentuk. Kebanyakan elemen arsitektural merupakan elemen fix, seperti dinding, plafon, lantai, dan lain-lain. Jalan dan bangunan juga menjadi elemen fix di dalam sebuah kota.

- Elemen Semifix, yaitu elemen ruang yang lebih mudah berubah dan dipindahkan, seperti perabot di dalam bangunan dan perabot jalan di dalam perkotaan.
 - Elemen Non Fix, yaitu elemen ruang yang berhubungan dengan penduduk di dalam sebuah setting ruang. Ruang ini terbentuk dari bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kebiasaan non verbal yang terjadi di dalamnya yang dapat menciptakan komunikasi dan makna.
9. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) dalam prose pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek.